



PEMERINTAH KOTA DUMAI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA KERJA 2019

Peraturan Walikota Dumai Nomor 51 Tahun 2018
Tentang Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah
Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2019



WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4432);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 6 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
17. Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 27 Seri E);
18. Peraturan Walikota Dumai Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 23 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Dumai
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah memuat penjabaran dari Visi, Misi, Kebijakan dan Program Walikota untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2016-2021.
7. Rencana Strategis OPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) Tahun.
9. Rencana Kerja OPD yang selanjutnya disingkat Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II RENCANA KERJA OPD TAHUN 2019

Pasal 2

- (1) Renja OPD beserta matrik Program Prioritas OPD Tahun 2019 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah OPD untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2019 yang dihitung mulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember 2019.
- (2) Renja OPD Tahun 2019 merupakan pelaksanaan tahun ke 3 (tiga) dari Renstra OPD Tahun 2016-2021.
- (3) Renja Kerja Organisasi Perangkat Daerah tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi :
 - a. salah 1 (satu) bahan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), khususnya Program/Kegiatan yang tercantum dalam OPD Tahun 2019;
 - b. bahan bagi OPD untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2019, setelah tercantum dalam KUA dan PPAS.

Pasal 3

Renja OPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Tindak lanjut dari pengesahan Renja OPD ini adalah Penetapan Renja OPD oleh Kepala OPD setelah ditetapkannya Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Penyajian Renja OPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Hasil evaluasi renja tahun lalu;
 - c. BAB III Tujuan dan sasaran OPD;
 - d. BAB IV Rencana kerja dan pendanaan OPD;
 - e. BAB V Penutup.
- (2) Penjabaran Renja OPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 14 Oktober 2018

WALIKOTA DUMAI,

ZULKIFLIAS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 14 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

M. NASIR

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2018 NOMOR 33 SERI 1

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DUMAI
 NOMOR 91 TAHUN 2018
 TENTANG RENCANA KERJA ORGANISASI
 PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI
 TAHUN 2019

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI
 TAHUN 2019

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	2
1.	DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI
2.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI
3.	DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI
5.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA DUMAI
6.	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI
7.	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA DUMAI
8.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DUMAI
9.	DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI
10.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA DUMAI
11.	DINAS PERIKANAN KOTA DUMAI
12.	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DUMAI
13.	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA DUMAI
14.	DINAS SOSIAL KOTA DUMAI
15.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DUMAI
16.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI
17.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI
18.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DUMAI
19.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DUMAI
20.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
21.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI
22.	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KOTA DUMAI/ BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DUMAI
23.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DUMAI
24.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DUMAI
25.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DUMAI
26.	INSPEKTORAT KOTA DUMAI
27.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
28.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI
29.	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI
30.	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
31.	KECAMATAN DUMAI BARAT KOTA DUMAI

1	2
32.	KECAMATAN DUMAI KOTA KOTA DUMAI
33.	KECAMATAN DUMAI SELATAN KOTA DUMAI
34.	KECAMATAN BUKIT KAPUR KOTA DUMAI
35.	KECAMATAN MEDANG KAMPAI KOTA DUMAI
36.	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI


WALIKOTA DUMAI,

ZULKIPLI AS

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DUMAI
 NOMOR 57 TAHUN 2018
 TENTANG RENCANA KERJA ORGANISASI
 PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI
 TAHUN 2019

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI
 TAHUN 2019

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	2
1.	DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI
2.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI
3.	DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI
5.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA DUMAI
6.	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI
7.	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA DUMAI
8.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DUMAI
9.	DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI
10.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA DUMAI
11.	DINAS PERIKANAN KOTA DUMAI
12.	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DUMAI
13.	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA DUMAI
14.	DINAS SOSIAL KOTA DUMAI
15.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DUMAI
16.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI
17.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI
18.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DUMAI
19.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DUMAI
20.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
21.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI
22.	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KOTA DUMAI/ BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DUMAI
23.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DUMAI
24.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DUMAI
25.	INSPEKTORAT KOTA DUMAI
26.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
27.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI
28.	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI
29.	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
30.	KECAMATAN DUMAI BARAT KOTA DUMAI
31.	KECAMATAN DUMAI TIMUR KOTA DUMAI

1	2
32.	KECAMATAN DUMAI TIMUR KOTA DUMAI
33.	KECAMATAN DUMAI KOTA KOTA DUMAI
34.	KECAMATAN DUMAI SELATAN KOTA DUMAI
35.	KECAMATAN BUKIT KAPUR KOTA DUMAI
36.	KECAMATAN MEDANG KAMPAI KOTA DUMAI
37.	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI

WALIKOTA DUMAI,

ZULKIELI AS

KATA PENGANTAR

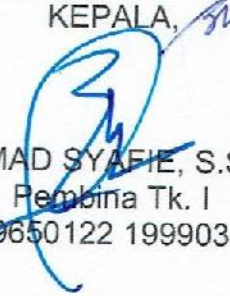
ALHAMDULILLAAH, segala puji hanya bagi ALLAH SWT. Berkat rahmat dan karunia-Nya perumusan Renja Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2019 dapat disusun dengan baik dan selesai tepat pada waktu yang telah ditetapkan.

RENJA BAPPEDA Tahun 2019 ini disusun mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis di bidang perencanaan pembangunan, capaian pelayanan BAPPEDA tahun sebelumnya, tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah BAPPEDA, strategi dan arah kebijakan jangka menengah dalam mencapai tolak ukur keberhasilan pelayanan BAPPEDA, serta program dan kegiatan prioritas untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kota Dumai Tahun 2016-2021.

Dokumen RENJA BAPPEDA Tahun 2019 ini selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman dalam merencanakan program dan kegiatan BAPPEDA pada Tahun 2019 dan digunakan sebagai bahan evaluasi capaian kinerja pelayanan BAPPEDA dalam rangka mendukung pencapaian RENSTRA Bappeda serta Misi Keempat RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 "Mewujudkan Pemerintahan Yang Efektif, Bersih Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan" khususnya di bidang perencanaan pembangunan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung tersusunnya dokumen RENJA ini, terutama kepada seluruh pegawai BAPPEDA yang telah berkoordinasi dengan baik sehingga seluruh tahapan penyusunan dokumen ini dapat dilaksanakan dengan baik.

Dumai, 14 Oktober 2018
Beppeda Kota Dumai
KEPALA,


MUHAMMAD SYAFIE, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19650122 199903 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Tahun 2016-2021	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda	14
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	16
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	17
2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat	26
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	27
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	28
3.3. Program dan Kegiatan	28
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	31
BAB V PENUTUP	39

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah	8
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai	15
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Dumai Tahun 2019	18
Tabel 3.1	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Pemerintah Pusat Tahun 2019 kedalam Prioritas Pembangunan Kota Dumai Tahun 2019	27
Tabel 3.2	Visi, Misi, Target Tujuan dan Sasaran 2019	28
Tabel 3.3	Program dan Kegiatan	29
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019 Dan Perkiraan Maju Tahun 2020 Kota Dumai	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir Proses Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019	2
------------	---	---

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RKPD dan Renstra Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran disertai dana yang diperlukan untuk pelaksanaannya yang disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,

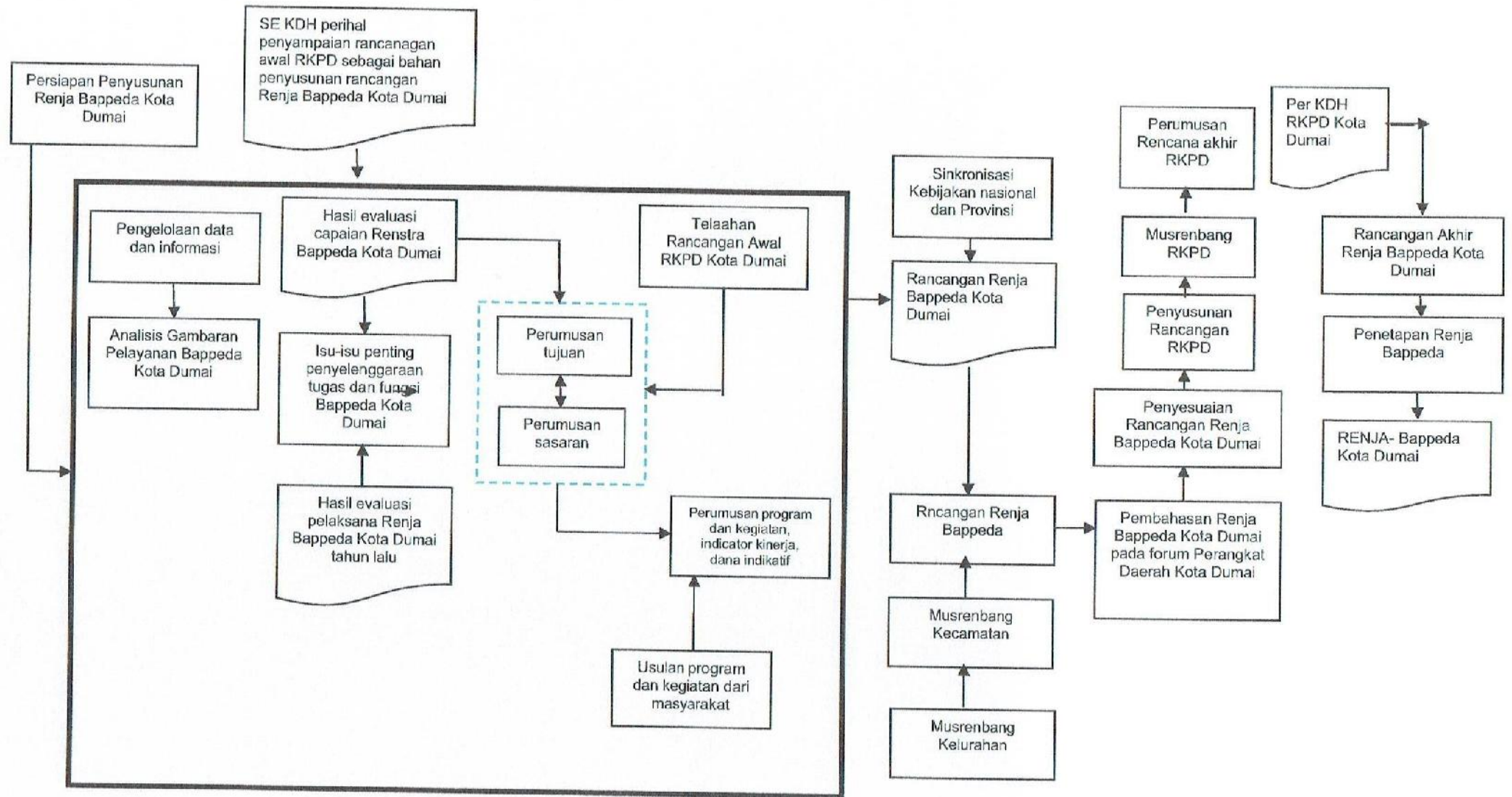
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan Rencana Strategis lima tahun kedalam Perencanaan Tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Acuan Renja Bappeda Tahun 2019 adalah Renstra Bappeda Tahun 2016-2021 dan RKPD Tahun 2019. Program dan kegiatan dijabarkan dalam matrik yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan sumber dana. Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja Bappeda Tahun 2019 merupakan:

1. Pedoman Bappeda dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019.
2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Selanjutnya rencana kerja (Renja) menjadi pedoman dalam proses penganggaran Tahun Anggaran 2019. Berikut bagan alir proses penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 :

Gambar 1.1
 Bagan Alir Proses Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019



1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 104, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 7 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Riau Tahun 2014-2019;
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005 – 2025;
19. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Dumai;

20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 8 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 27 Seri E);
22. Peraturan Walikota Dumai Nomor 67 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 23 seri D);
23. Peraturan Walikota Dumai Nomor 40 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2019 (Berita Daerah 24 Seri E).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

- 1) Untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- 2) Menjabarkan rencana strategis pembangunan yang telah dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam bentuk rencana kerja tahunan.

1.3.2. Tujuan

- 1) Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan Perangkat Daerah;
- 2) Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan Perangkat Daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
- 3) Memberikan informasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019;
- 4) Menjadi pedoman dalam proses penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- 2.4. Review Rancangan Awal RKPD.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

**1.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN
RENSTRA TAHUN 2016-2021**

Adapun evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTPUT) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET RPJMD KOTA DUMAI PADA TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN REKONSTRUKSI TAHUN 2018	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2018	
				TARGET REKONSTRUKSI TAHUN 2017	REALISASI REKONSTRUKSI TAHUN 2017	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN SAMPAI TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN									
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor	Persentase	100	100	100	100	100	40	40%
Pelayanan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim selama 1 tahun	Jumlah / Bulan	60	12	100	12	12	24	40%
Pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pemakain jaringan komunikasi	Bulan	7	7	100	7	0	7	100%
Pelayanan jasa peralatan dan perangkat kantor	Terlaksananya panitia pameran Kota Dumai Tahun 2019	Kali	3	1	100	1	1	2	67%
Pelayanan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	Bulan	60	12	100	12	12	24	40%
Pelayanan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Unit	150	5	100	5	5	10	7%
Pelayanan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Bulan	60	12	100	12	12	24	40%
Pelayanan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Bulan	60	12	100	12	12	24	40%
Pelayanan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terperluhunya kebutuhan komponen listrik kantor	Bulan	60	12	100	12	12	24	40%
Pelayanan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan tentang perundang- undangan	Bulan/jenis	60	12	100	12	12	24	40%
Pelayanan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman tamu, rapat serta harian	Bulan	60	12	100	12	12	24	40%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya perjalanan dinas dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	Bulan	60	12	100	12	12	24	40%
Pelayanan jasa keamanan kantor	Jumlah penyediaan jasa keamanan kantor	Bulan/orang	60	12	100	12	12	24	40%
Pelayanan jasa pelayanan administrasi perkantoran	Terbayarnya pembayaran honor jasa administrasi perkantoran	bulan / orang	60	12	100	12	12	24	40%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase	100	100	100	100	100	40	40%
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Unit	159	8	100	8	0	8	5%
Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan sarana dan prasarana untuk aparatur BAPPEDA	Unit	152	1	100	1	1	2	1%
Pengadaan mebeleur	Jumlah penyediaan meubelur kantor	Paket	1				1	1	100%

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET RPJMD KOTA DUMAI PADA TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2018	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2018	
				TARGET RENJA PD TAHUN 2017	REALISASI RENJA PD TAHUN 2017	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN SAMPAI TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara berkala	Unit	3	1	1	100%	1	1	33%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	Kendaraan	27	24	24	100%	24	24	89%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	orang	59				7	7	12%
Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal	orang	59				7	7	12%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen pelaporan kinerja dan keuangan	Dokumen	21	3	3	100%	3	6	29%
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	13	2	2	100%	2	4	31%
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	Dokumen	8	1	1	100%	1	2	25%
Program pengembangan data/informasi	Persentase peningkatan data dan Informasi terhadap pembangunan daerah	Persentase	90	50	50	100%	60	22	24%
Penyusunan profile daerah	Jumlah dokumen informasi tentang statistik Kota Dumai	Dokumen	2	1	1	100%	1	2	100%
Sistem informasi perencanaan daerah	Jumlah aplikasi yang terinput	Aplikasi	2	2	2	100%	2	1	40%
	Jumlah orang admin OPD aplikasi Simreda yang terbayarkan	Orang	147	36	36	100%	36	72	49%
Program Kerjasama Pembangunan	Persentase peningkatan kerjasama pembangunan daerah	Persentase	80	40	40	100%	50	18	23%
Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah	Tahun	5	1	1	100%	1	2	40%
	Jumlah laporan TJSP/CSR yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah	Laporan	5	1	1	100%	1	2	40%
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Jumlah dokumen usulan program dan kegiatan rencana tata ruang perbatasan	Dokumen	5	1	1	100%	1	2	40%
Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan	Dokumen usulan program dan kegiatan rencana tata ruang perbatasan ke BPBD Provinsi Riau dan BNPP Pusat	Dokumen	5	1	1	100%	1	2	40%

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET RPJMD KOTA DUMAI PADA TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2018	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2018	
				TARGET RENJA PD TAHUN 2017	REALISASI RENJA PD TAHUN 2017	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN SAMPAI TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Jumlah dokumen kebijakan perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Dokumen	23	4	4	100%	4	8	35%
	Proporsi usulan masyarakat bidang infrastruktur dan kewilayahan yang diakomodir dalam RKPD	Persentase	35	15	15	100%	20	7	20%
Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan	Tertindaknya koordinasi terkait penyelesaian dan perencanaan infrastruktur transportasi	Kali	41	6	6	100%	6	12	29%
Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	Tertindaknya keselarasan perencanaan pembangunan Nasional-Provinsi-Kab./Kota di bidang perekonomian	OPD	6	6	6	100%	6	3	50%
Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri	Tertindaknya dokumen perencanaan penanganan pusat-pusat industri	Dokumen	5	1	1	100%	1	2	40%
Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Tertindaknya dokumen perencanaan akses air bersih/air minum dan sanitasi yang di Kota Dumai	Dokumen	10	2	2	100%	2	4	40%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dokumen dan data-data hasil monitoring dan evaluasi perencanaan fisik sarana dan prasarana	Dokumen	5	1	1	100%	1	2	40%
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan	Dokumen	61	10	10	100%	12	22	36%
	Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	Persentase	35	15	15	100%	20	7	20%
	Tertindaknya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Dokumen	12	2	15	750%	3	4	30%
	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	Persentase	100	100	100	100%	100	40	40%
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Tertindaknya forum OPD	Forum	5	1	1	100%	1	2	40%
Penyusunan rancangan RPJMD	Jumlah Dokumen RPJMD	Dokumen	3	1	1	100%		1	33%
Penetapan RPJMD	Tertindaknya dokumen RPJMD dan Perubahan RPJMD	Dokumen	2				1	1	50%

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET RPJMD KOTA DUMAI PADA TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2018	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2018	
				TARGET RENJA PD TAHUN 2017	REALISASI RENJA PD TAHUN 2017	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN SAMPAI TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
Penyusunan rancangan RKPD	Tersusunnya dokumen RKPD dan dokumen Perubahan RKPD	Dokumen	10	2	2	100%	2	4	40%
Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah Musrenbang RKPD yang dilaksanakan, keikutsertaan Pra dan Pasca Musrenbang Provinsi Riau, keikutsertaan Musrenbang tingkat Nasional Tahun 2019	Kali	15	3	3	100%	3	6	40%
Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Jumlah Lakip yang disusun dan disampaikan ke kemendagri dan pemerintah provinsi	Dokumen	5	1	1	100%	1	2	40%
Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ)	Jumlah dokumen LKPJ yang disampaikan tepat waktu	Dokumen	5	1	1	100%	1	2	40%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen evaluasi RKPD	Dokumen	23	4	4	100%	4	8	35%
Bimbingan teknis evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	Kali	4				1	1	25%
Evaluasi rencana aksi daerah pemberantasan korupsi (RAD-PK) Dumai	Jumlah dokumen pelaporan RAD-PK	Dokumen	5	1	1	100%	1	2	40%
Penyusunan dan evaluasi perencanaan aksi daerah sustainable development goals	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi SDG-s	Dokumen	4				1	1	25%
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah dokumen kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan ekonomi	Dokumen	10	2	2	100%	2	4	40%
	Proporsi usulan masyarakat bidang ekonomi yang diakomodir dalam RKPD	Persentase	35	15	15	100%	20	7	20%
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Dokumen	5	1	1	100%	1	2	40%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen	Dokumen	5	1	1	100%	1	2	40%
Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan bidang sosial budaya	Dokumen	11	2	2	100%	3	5	45%

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET RPJMD KOTA DUMAI PADA TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2018	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2018	
				TARGET RENJA PD TAHUN 2017	REALISASI RENJA PD TAHUN 2017	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN SAMPAI TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
	Proporsi usulan masyarakat bidang sosial dan budaya yang diakomodir dalam RKPD	Persentase	35	15	15	100%	20	7	20%
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Persentase koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	Persentase	90	90	90	100%	90	36	40%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen dan data-data hasil monitoring dan evaluasi perencanaan sosial budaya	Dokumen	7	2	2	100%	2	4	57%
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM	Persentase koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM	Persentase	90	90	90	100%	90	36	40%
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur pemerintahan	Persentase koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur	Persentase	90	90	90	100%	90	36	40%
Penyusunan data dan informasi perencanaan pembangunan bidang agama, sosial dan kebudayaan	Jumlah dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan SDM	Dokumen	4				1	1	25%

Dari data diatas, terhadap pencapaian target pada tahun akhir RPJMD 2021, untuk tahun 2018 pencapaian yang telah 100 % ada sebanyak 3 kegiatan, hal ini disebabkan karena penyelesaian kegiatan dimaksud hanya selama 2 tahun anggaran dan berakhir sampai dengan tahun 2018, sedangkan kegiatan yang lainnya pencapaian berkisar dari 12 % sampai dengan 57 %.

1.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BAPPEDA

Bappeda Kota Dumai telah menyelenggarakan pelayanan dibidang perencanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan berhasil guna. Penetapan indikator kinerja dirumuskan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Adapun pencapaian kinerja pelayanan Bappeda berdasarkan indikator-indikator kinerja tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai
Sumber: BAPPEDA, 2018

No.	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1.	Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD				15%	20%	25%	30%	15%	20%	25%	30%	
2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA				2 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
3.	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Dari data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk capaian tahun 2017 seluruh indikator kinerja sudah terealisasi 100 % sesuai dengan target yang ditetapkan, sedangkan untuk realisasi capaian tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD sudah diakomodir 20%, usulan masyarakat tersebut dibahas ketika pelaksanaan Musrenbang RKPD di Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kota Dumai;
2. Indikator Tersedianya Dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada, target 2018 adalah tersedianya 3 Dokumen, dari ketiga dokumen tersebut yang telah terealisasi baru 2 dokumen, yakni :
 - 2.1. Dokumen Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 8 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021;
 - 2.2. Dokumen Peraturan Walikota Dumai Nomor 40 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2019 (Berita Daerah 24 Seri E);Sedangkan Dokumen Peraturan Walikota tentang perubahan RKPD Tahun 2018, tengah dalam proses penyelesaian rancangan akhir.
3. Indikator Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD, target 2018 adalah 100 %, target ini telah terealisasi 100%, yakni semua program yang ada dalam RPJMD seluruhnya telah direalisasikan dalam RKPD Tahun 2019.

2.3.ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Pada tahun 2018, pemerintah Kota Dumai telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 8 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021, perubahan RPJMD Kota Dumai dimaksud dilakukan berkaitan dengan :

1. Penyesuaian kembali tujuan, sasaran, strategi, kebijakan yang tertuang pada RPJMD Kota Dumai dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2016-2021 paska disahkannya Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai pada tanggal 1 Desember 2016;

2. Memformulasikan kembali indikator-indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan daerah, serta melakukan update data dan informasi yang sesuai dengan kondisi riil di daerah;
3. Penyesuaian kembali indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dalam rangka mendukung pencapaian visi Kota Dumai di tahun 2021.

Perubahan RPJMD tersebut tentunya akan diikuti dengan perubahan Renstra Perangkat Daerah, perubahan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah serta perubahan RPJMD Kota Dumai sebagai dasar penyusunan RKPD Tahun 2019 dan Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2018, sehingga indikator serta target-target yang akan dicapai pada tahun 2019 pada Rencana Kerja Bappeda pada tahun 2019 ini sudah mengacu pada perubahan RPJMD dimaksud.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Kota Dumai Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Dumai Tahun 2019

RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Non Urusan										
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Prosentase Pelayanan Administrasi Pekerjaan umum yang terlayani	100%	2.443.446.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor	100%	2.456.193.660	
Penyediaan jasa surat menyurat	Kota	Jumlah surat menyurat	12 Bulan	3.600.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota	Jumlah surat menyurat	12 Bulan	3.600.000	
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD	Terlaksananya panitia pameran Kota Dumai Tahun 2019	1 kali	30.000.000	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD	Terlaksananya panitia pameran Kota Dumai Tahun 2019	1 kali	30.000.000	
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Tersedianya Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2	24 unit	55.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Tersedianya Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2	24 unit	55.000.000	
Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD	Jumlah jasa kebersihan kantor	12 Bulan	125.000.000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD	Jumlah jasa kebersihan kantor	12 Bulan	125.000.000	
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	15 unit	84.350.000	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	15 unit	84.350.000	
Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	199.000.000	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	199.000.000	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	60.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	62.747.660	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik kantor	12 bulan	240.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik kantor	12 bulan	240.000.000	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan tentang perundang-undangan	2 Jenis	40.000.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan tentang perundang-undangan	2 Jenis	50.000.000	
Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	Tersedianya makanan dan minuman Tamu,Rapat serta Harian	12 bulan	84.096.000	Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	Tersedianya makanan dan minuman Tamu,Rapat serta Harian	12 bulan	84.096.000	
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD	Terselenggaranya perjalanan dinas dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	12 Bulan	700.000.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD	Terselenggaranya perjalanan dinas dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	12 Bulan	700.000.000	
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	SKPD	Jumlah penyediaan jasa keamanan kantor	6 orang	122.400.000	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	SKPD	Jumlah penyediaan jasa keamanan kantor	6 orang	122.400.000	

Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	RANCANGAN AWAL				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD	Terbayarnya pembayaran honor jasa administrasi perkantoran	12 Bulan	700.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD	Terbayarnya pembayaran honor jasa administrasi perkantoran	12 Bulan	700.000.000	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	1.079.000.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	1.820.000.000	
Pembangunan gedung kantor	SKPD	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 kegiatan	0	Pembangunan gedung kantor	SKPD	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 kegiatan	200.000.000	
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah kendaraan dinas	1 unit	300.000.000	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	2 unit	600.000.000	
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	9 unit	150.000.000	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	9 unit	200.000.000	
Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah peralatan sarana dan prasarana untuk aparatur BAPPEDA	11 unit	150.000.000	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah peralatan sarana dan prasarana untuk aparatur BAPPEDA	11 unit	200.000.000	
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara berkala	8 unit	220.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara berkala	8 unit	220.000.000	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	25 Kendaraan	250.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	24 Kendaraan	400.000.000	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Meningkatnya Jumlah Sumber Daya Aparatur	83 orang	495.069.685	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	10 orang	530.000.000	
Pendidikan dan pelatihan formal	SKPD	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal	10 orang/tahun	130.000.000	Pendidikan dan pelatihan formal	SKPD	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal	12 orang	130.000.000	
Sosialisasi peraturan perundang-undangan	SKPD	Tersosialisasi peraturan perundang-undangan	1 Kali	115.069.685	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	SKPD	Tersosialisasi peraturan perundang-undangan	1 Kali	200.000.000	
Pembinaan mental dan fisik aparatur	SKPD	Terlaksananya pembinaan jasmani dan rohani Jumlah Aparatur yang mengikuti pembinaan fisik dan mental di Bappeda	12 Kali 150 Orang	250.000.000	Pembinaan mental dan fisik aparatur	SKPD	Terlaksananya pembinaan jasmani dan rohani	12 Kali	200.000.000	
							Jumlah Aparatur yang mengikuti pembinaan fisik dan mental di Bappeda	50 Orang		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Prosentase laporan yang disusun tepat dan sesuai regulasi	5 Dokumen	101.000.000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Jumlah Dokumen pelaporan kinerja dan keuangan	3 Dokumen	130.000.000	
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 dokumen	51.000.000	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 dokumen	70.000.000	

RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	50.000.000	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	2 dokumen	60.000.000	
Wajib										
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
Program Perencanaan Tata Ruang		Jumlah dokumen tata ruang	5 Dokumen	555.000.000	Program Perencanaan Tata Ruang		Jumlah dokumen tata ruang	5 Dokumen	555.000.000	
Penyusunan rencana teknis ruang kawasan	SKPD	Jumlah dokumen rencana teknis Ruang Kawasan terhadap RTRW	1 dokumen	125.000.000	Penyusunan rencana teknis ruang kawasan	SKPD	Jumlah dokumen rencana teknis Ruang Kawasan terhadap RTRW	1 dokumen	125.000.000	
Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	Kota	SKPD Koordinasi BKPRD; Jumlah Dokumen Perencanaan Pasca Penetapan Perda RTRW Kota Dumai; Peningkatan Muatan Teknis tentang Penataan Ruang oleh Tenaga Ahli	2 dokumen	240.000.000	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	Kota	terlaksananya Koordinasi tentang rencana tata ruang	15 kali	240.000.000	
Survey dan pemetaan	Kota	Jumlah dokumen survey dan pemetaan data-data spasial pemukiman	1 dokumen	190.000.000	Survey dan pemetaan	Kota	Jumlah dokumen survey dan pemetaan data-data spasial pemukiman	1 dokumen	190.000.000	
Program Pemanfaatan Ruang		Meningkatnya prosentase pemanfaatan ruang	100%	177.000.000	Program Pemanfaatan Ruang		persentase peningkatan pemanfaatan ruang	100%	255.000.000	
Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang	SKPD	Sosialisasi Perda RTRW ke stakeholder yang terkait	15 stakeholder	50.000.000	Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang	SKPD	Sosialisasi Perda RTRW ke stakeholder yang terkait	15 stakeholder	100.000.000	
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang	Kota	Dokumen monitoring dan evaluasi pelaporan terhadap pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kota Dumai	1 dokumen	127.000.000	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang	Kota	Dokumen monitoring dan evaluasi pelaporan terhadap pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kota Dumai	1 dokumen	155.000.000	
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		Meningkatnya prosentase pengawasan terhadap pemanfaatan ruang	100%	100.000.000	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		persentase peningkatan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang	100%	204.000.000	
Pengawasan pemanfaatan ruang	Kota	Pengawasan pemanfaatan ruang di lapangan oleh pokja pemanfaatan ruang BKPRD Kota Dumai	3 kali	100.000.000	Pengawasan pemanfaatan ruang	Kota	Pengawasan pemanfaatan ruang di lapangan oleh pokja pemanfaatan ruang BKPRD Kota Dumai	3 kali	204.000.000	
Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman										
Program Pengembangan Perumahan		Meningkatnya prosentase kualitas perumahan dan pemukiman	100%	350.000.000	Program Pengembangan Perumahan		Persentase Kualitas perumahan dan pemukiman	100%	430.000.000	
Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	SKPD	Jumlah dokumen Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Pemukiman Kumuh Kota Dumai	1 dokumen	350.000.000	Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	SKPD	Jumlah dokumen Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Pemukiman Kumuh Kota Dumai	1 dokumen	350.000.000	

RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan	SKPD	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang perumahan dan permukiman kumuh ke stakeholder yang terkait	15 stakeholder	0	Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan	SKPD	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang perumahan dan permukiman kumuh ke stakeholder yang terkait	15 stakeholder	80.000.000	
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		Jumlah dokumen penanggulangan kemiskinan	1 Dokumen	300.000.000	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		Jumlah dokumen penanggulangan kemiskinan	1 Dokumen	300.000.000	
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	SKPD	Jumlah dokumen	1 dokumen	300.000.000	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	SKPD	Jumlah dokumen	1 dokumen	300.000.000	
Perencanaan										
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar		Jumlah dokumen kebijakan perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	9 Dokumen	1.162.000.000	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar		Jumlah dokumen kebijakan perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	1 Dokumen	1.162.000.000	
Koordinasi perencanaan penanganan infrastruktur	SKPD	Jumlah koordinasi perencanaan penanganan infrastruktur	9 kali	142.000.000	Koordinasi perencanaan penanganan perumahan	SKPD	Dokumen perencanaan teknis penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta perumahan permukiman diluar kawasan kumuh	1 dokumen	50.000.000	
Koordinasi perencanaan penanganan perumahan	SKPD	Dokumen perencanaan teknis penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta perumahan permukiman diluar kawasan kumuh	1 dokumen	50.000.000	Koordinasi perencanaan penanganan infrastruktur	SKPD	Jumlah koordinasi perencanaan penanganan infrastruktur	9 kali	142.000.000	
Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan	SKPD	Terlaksananya koordinasi terkait penyelesaian dan perencanaan infrastruktur transportasi	9 kali	100.000.000	Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan	SKPD	Terlaksananya koordinasi terkait penyelesaian dan perencanaan infrastruktur transportasi	9 kali	100.000.000	
Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	SKPD	Terwujudnya keselaran perencanaan pembangunan Nasional-Provinsi-Kabupaten/Kota di Bidang Perekonomian	6 OPD	136.000.000	Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	SKPD	Terwujudnya keselaran perencanaan pembangunan Nasional-Provinsi-Kabupaten/Kota di Bidang Perekonomian	6 OPD	136.000.000	
Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri	SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan penanganan pusat-pusat industri	1 Dokumen	200.000.000	Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri	SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan penanganan pusat-pusat industri	1 Dokumen	200.000.000	
Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	SKPD	Tercapainya dokumen perencanaan akses air bersih/air minum dan sanitasi yang di Kota Dumai	2 dokumen	350.000.000	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	SKPD	Tercapainya dokumen perencanaan akses air bersih/air minum dan sanitasi yang di Kota Dumai	2 dokumen	350.000.000	
Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan	SKPD	Terlaksananya koordinasinya	8 kali	40.000.000	Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan	SKPD	Terlaksananya koordinasinya	8 kali	40.000.000	

RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan					penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan			
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	SKPD	Dokumen dan data-data hasil monitoring dan evaluasi perencanaan fisik sarana dan prasarana	1 dokumen	144.000.000	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	SKPD	Dokumen dan data-data hasil monitoring dan evaluasi perencanaan fisik sarana dan prasarana	1 dokumen	144.000.000	
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan		Jumlah dokumen usulan program dan kegiatan rencana tata ruang perbatasan	1 Dokumen	200.000.000	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan		Jumlah dokumen usulan program dan kegiatan rencana tata ruang perbatasan	1 Dokumen	200.000.000	
Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan	SKPD	Dokumen usulan program dan kegiatan rencana tata ruang perbatasan ke BPPD Provinsi Riau dan BNPP Pusat	1 dokumen	200.000.000	Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan	SKPD	Dokumen usulan program dan kegiatan rencana tata ruang perbatasan ke BPPD Provinsi Riau dan BNPP Pusat	1 dokumen	200.000.000	
Program Pengembangan data/informasi		Jumlah dokumen yang memuat data/informasi pembangunan daerah	4 dokumen	468.221.820	Program Pengembangan data/informasi		Persentase peningkatan data dan informasi terhadap pembangunan daerah	70%	550.000.000	
Sistem Informasi Perencanaan Daerah		Jumlah Admin OPD yang memahami Aplikasi Jumlah aplikasi yang diterapkan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	37 OPD 4 aplikasi	306.000.000	Sistem Informasi Perencanaan Daerah	SKPD	Jumlah aplikasi yang terinput	2 aplikasi	350.000.000	
							Jumlah orang admin OPD aplikasi Simreda yang terbayarkan	37 orang		
Penyusunan Data Perencanaan Daerah	SKPD	Jumlah data yang terinput pada aplikasi informasi database pembangunan Kota Dumai Jumlah buletin pada Litbang Bappeda Jumlah laporan SIPD yang dilaporkan ke Provinsi	100% 1 Buletin 1 Dokumen	162.221.820	Penyusunan Data Perencanaan Daerah	SKPD	Jumlah data yang terinput pada aplikasi informasi database pembangunan Kota Dumai	60%	200.000.000	
							Jumlah buletin pada Litbang Bappeda	1 Buletin		
							Jumlah laporan SIPD	1 Laporan		
Program Kerjasama Pembangunan		jumlah koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	6 kali	247.899.400	Program Kerjasama Pembangunan		Persentase Peningkatan Kerjasama pembangunan daerah	60%	247.899.400	
Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	SKPD	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka perencanaan pembangunan	1 Tahun 1 Laporan	247.899.400	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	SKPD	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka	1 Tahun	247.899.400	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	RANCANGAN AWAL				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		daerah Jumlah Laporan TJSP/CSR yang berpartisipasi dalam Pembangunan Daerah Jumlah Perusahaan yang Menerima Award TJSP/CSR	3 Perusahaan				perencanaan pembangunan daerah			
							Jumlah Laporan TJSP/CSR yang berpartisipasi dalam Pembangunan Daerah	1 Laporan		
Program perencanaan pembangunan daerah		Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan	13 Dokumen	2.071.712.720	Program perencanaan pembangunan daerah		Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan	10 Dokumen	2.071.712.720	
Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	SKPD	Jumlah dokumen Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	1 Dokumen	165.000.000	Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	SKPD	Jumlah dokumen Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	1 Dokumen	165.000.000	
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	SKPD	Terlaksananya forum OPD	1 Kegiatan	171.314.100	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	SKPD	Terlaksananya forum OPD	1 forum	171.314.100	
Penyusunan rancangan RKPD	SKPD	Perubahan RKPD yang disusun	75 Buku/Dokumen	247.778.400	Penyusunan rancangan RKPD	SKPD	Tersusunnya Dokumen RKPD dan Dokumen Perubahan RKPD	2 Dokumen	247.778.400	
Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Kota	Jumlah Musrenbang RKPD yang dilaksanakan, keikutsertaan Pra dan Pasca Musrenbang Provinsi Riau, keikutsertaan Musrenbang tingkat Nasional Tahun 2018	3 kali	288.374.400	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Kota	Jumlah Musrenbang RKPD yang dilaksanakan, keikutsertaan Pra dan Pasca Musrenbang Provinsi Riau, keikutsertaan Musrenbang tingkat Nasional Tahun 2019	3 kali	288.374.400	
Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Kota	Jumlah Lakip yang disusun dan disampaikan ke kemendagri dan pemerintah provinsi	1 dokumen	223.977.720	Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Kota	Jumlah Lakip yang disusun dan disampaikan ke kemendagri dan pemerintah provinsi	1 dokumen	223.977.720	
Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Kota	Jumlah dokumen LKPJ yang disampaikan tepat waktu	1 dokumen	254.393.100	Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Kota	Jumlah dokumen LKPJ yang disampaikan tepat waktu	1 dokumen	254.393.100	
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi RKPD	5 dokumen	87.265.000	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi RKPD	5 dokumen	87.265.000	
Bimbingan Teknis Evaluasi dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimtek	1 Kali	170.000.000	Bimbingan Teknis Evaluasi dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimtek	1 Kali	170.000.000	
Evaluasi rencana aksi daerah pemberantasan korupsi (RAD-PK) dumai	SKPD	Jumlah dokumen pelaporan RAD-PK	1 dokumen	228.610.000	Evaluasi rencana aksi daerah pemberantasan korupsi (RAD-PK) dumai	SKPD	Jumlah dokumen pelaporan RAD-PK	1 dokumen	228.610.000	
Penyusunan dan evaluasi perencanaan aksi daerah sustainable development goals	SKPD	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi SDG's	1 dokumen	237.000.000	Penyusunan dan evaluasi perencanaan aksi daerah sustainable development goals	SKPD	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi SDG-s	1 dokumen	237.000.000	
Program perencanaan pembangunan ekonomi		Jumlah dokumen kebijakan perencanaan, pengendalian	4 Dokumen	330.000.000	Program perencanaan pembangunan ekonomi		Jumlah dokumen kebijakan perencanaan, pengendalian	4 Dokumen	330.000.000	

Tabel 2.1
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
 Sampai Dengan Tahun 2018
 Sumber : Bappeda Kota Dumai 2018

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET RPJMD KOTA DUMAI PADA TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2018	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2018	
				TARGET RENJA PD TAHUN 2017	REALISASI RENJA PD TAHUN 2017	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN SAMPAI TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)	8	9 (7+8)	10 (9/4)
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
Program Perencanaan Tata Ruang	Jumah dokumen tata ruang	Dokumen	8	1	1	100%	1	2	25%
Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	Terlaksananya Koordinasi tentang rencana tata ruang	Kali	80	15	15	100%	20	35	44%
Survey dan pemetaan	Jumlah dokumen survey dan pemetaan data-data spasial permukiman	Dokumen	5	1	1	100%	1	2	40%
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
Program Pengembangan Perumahan	Persentase kualitas perumahan dan permukiman	Persentase	100	100	100	100%	100	40	40%
Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	Jumlah dokumen Ranperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh Kota Dumai	Dokumen	5	1	1	100%	1	2	40%
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA									
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah dokumen penanggulangan kemiskinan	Dokumen	5	1	1	100%	100%	2	40%
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	Jumlah dokumen	Dokumen	5	1	1	100%	1	2	40%

RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Keuangan										
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				30.000.000	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase aset milik perangkat daerah yang dikelola dengan baik	90%	30.000.000	
Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	SKPD	Persentase aset milik perangkat daerah yang dikelola dengan baik	90%	30.000.000	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	SKPD	Persentase aset milik perangkat daerah yang dikelola dengan baik	90%	30.000.000	
	TOTAL			11.334.146.425					12.517.602.580	

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa :

1. Seluruh program dan kegiatan pada rancangan awal telah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan yakni terdiri dari 19 program dan 65 kegiatan;
2. Pagu indikatif Bappeda pada Tahun 2019 berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2019 adalah berjumlah Rp. 11.334.146.425, berdasarkan hasil analisis kebutuhan total pagu yang dibutuhkan pada tahun 2019 berjumlah Rp. 12.517.602.580,-, hal ini disebabkan ada beberapa kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan, besaran pagu dananya lebih besar dari rancangan awal RKPD.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat merupakan penelaahan dari usulan masyarakat atau kelompok masyarakat, asosiasi, LSM, perguruan tinggi dan stakeholder lainnya yang ditujukan kepada perangkat daerah khususnya ketika pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RKPD.

Penyampaian usulan masyarakat dalam rangka penyusunan RKPD 2019 disampaikan pada saat :

1. Rembuk RT dilaksanakan pada Minggu III Januari 2018;
2. Musrenbang RKPD di Kelurahan dilaksanakan pada Minggu IV Januari sampai dengan Minggu II Februari 2018;
3. Musrenbang RKPD di Kecamatan dilaksanakan pada Minggu III sampai dengan Minggu IV Februari 2018;
4. Forum Perangkat Daerah dilaksanakan pada Minggu II Maret 2018;
5. Musrenbang RKPD di Tingkat Kota dilaksanakan pada Minggu III Maret 2018.

Dari rangkaian pelaksanaan kegiatan diatas tidak ada usulan masyarakat yang ditujukan kepada Bappeda Kota Dumai.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Kota Dumai pada tahun 2021 **“Terwujudnya Masyarakat Dumai Yang Makmur dan Madani Pada Tahun 2021”**, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Bappeda Kota Dumai mendukung terwujudnya pencapaian misi keempat RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 yakni : *“Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.”*

Pada RKPD Kota Dumai Tahun 2019 guna tercapainya Misi keempat dimaksud maka Prioritas pembangunan Kota Dumai yang telah ditetapkan adalah **“Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik Yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan”**. Selanjutnya untuk melihat keterkaitan antara prioritas Pembangunan Kota Dumai dengan prioritas pembangunan nasional, khususnya berkenaan dengan misi keempat Kota Dumai dapat dilihat pada table 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Pemerintah Pusat Tahun 2019 kedalam
Prioritas Pembangunan Kota Dumai Tahun 2019
Sumber : RKPD Kota Dumai Tahun 2019

PRIORITAS KOTA DUMAI	PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS
1	2
Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Pelayanan Publik Yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif Dan Transparan	Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu : 1. Meningkatkan kamtibmas dan keamanan siber 2. Menjamin kesuksesan pemilu 3. Memperkuat pertahanan wilayah nasional 4. Meningkatkan kepastian hukum dan reformasi birokrasi 5. Memperkuat efektivitas diplomasi

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa berkaitan dengan prioritas Kota Dumai dalam Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik Yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan, pada tahun 2019 yang bertepatan dengan pelaksanaan Pemilihan Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta Pilkada serentak, maka Pemerintah Pusat memprioritaskan Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah dirumuskan Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Dumai yaitu Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas. Untuk mengukur tercapai atau tidaknya tujuan ini maka ditetapkan “tersedianya dokumen perencanaan jangka panjang menengah dan tahunan” sebagai indikator tujuan. Adapun sasaran yang dirumuskan untuk mencapai tujuan tersebut adalah meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah, dengan 3 (tiga) indikator/tolak ukur yaitu: (1) proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD; (2) tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA; dan (3) penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD. Kesesuaian antara Visi dan Misi Kota Dumai dengan Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Dumai serta target yang akan dicapai pada 2019 dapat dilihat pada tabel 3.2. berikut ini :

Tabel 3.2
Visi, Misi, Target Tujuan dan Sasaran 2019

Visi : Terwujudnya Masyarakat Dumai Yang Makmur dan Madani Pada Tahun 2021
Misi : Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun 2019
Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas		Tersedianya Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan	Ada
	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah	Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	25%
		Tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA	2 doku men
		Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100%

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Bappeda Kota Dumai pada Tahun 2019 disajikan dalam bentuk tabel pada tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3
Program dan Kegiatan

Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Program	Kegiatan	
1	2	3	
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Perencanaan Tata Ruang	Program Perencanaan Tata Ruang	
		Penyusunan rencana teknis ruang kawasan	
		Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	
	Program Perencanaan Tata Ruang	Survey dan pemetaan	
		Penyusunan rencana teknis ruang kawasan	
		Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	
	Program Pemanfaatan Ruang	Survey dan pemetaan	
		Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang	
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang	
		Pengawasan pemanfaatan ruang	
Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	Program Pengembangan Perumahan	Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	
		Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan	
		Koordinasi perencanaan penanganan perumahan	
Perencanaan	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Koordinasi perencanaan penanganan infrastruktur	
		Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan	
		Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	
		Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri	
		Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	
		Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan	
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	
		Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan
		Program Pengembangan data/informasi	Sistem Informasi Perencanaan Daerah Penyusunan Data Perencanaan Daerah
		Program Kerjasama Pembangunan	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah
	Program perencanaan pembangunan daerah	Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	
		Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	
		Penyusunan rancangan RKPD	
		Penyelenggaraan musrenbang RKPD	
		Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	
		Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	
		Bimbingan Teknis Evaluasi dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan	
		Evaluasi rencana aksi daerah pemberantasan korupsi (RAD-PK) dumai	
		Penyusunan dan evaluasi perencanaan aksi daerah sustainable development goals	
	Program perencanaan pembangunan ekonomi	koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	

Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Program	Kegiatan
1	2	3
	Program perencanaan sosial dan budaya	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Monitoring, evaluasi dan pelaporan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM Koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur Pemerintahan Penyusunan data dan informasi perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan SDM
Administrasi Pemerintahan	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)
Pengawasan	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Evaluasi realisasi anggaran
Kuangan	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah
Non Urusan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan gedung kantor Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal Sosialisasi peraturan perundang-undangan Pembinaan mental dan fisik aparatur
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Bappeda Kota Dumai pada Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019
Dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1			Wajib						
1	3		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1	3	31	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumah dokumen tata ruang	5 Dokumen	555.000.000		5 Dokumen	
1	3	31	6 Penyusunan rencana teknis ruang kawasan	SKPD Jumlah dokumen rencana teknis Ruang Kawasan terhadap RTRW	1 dokumen	125.000.000	APBD	1 dokumen	125.000.000
1	3	31	10 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	Kota terlaksananya Koordinasi tentang rencana tata ruang	15 kali	240.000.000	APBD	15 kali	240.000.000
1	3	31	13 Survey dan pemetaan	Kota Jumlah dokumen survey dan pemetaan data-data spasial permukiman	1 dokumen	190.000.000	APBD	1 dokumen	190.000.000
1	3	32	Program Pemanfaatan Ruang	persentase peningkatan pemanfaatan ruang	100%	255.000.000		100%	
1	3	32	7 Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang	SKPD Sosialisasi Perda RTRW ke stakeholder yang terkait	15 stakeholder	100.000.000	APBD	15 stakeholder	50.000.000
1	3	32	9 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang	Kota Dokumen monitoring dan evaluasi pelaporan terhadap pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kota Dumai	1 dokumen	155.000.000	APBD	1 dokumen	127.000.000
1	3	33	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	persentase peningkatan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang	100%	204.000.000		100%	
1	3	33	5 Pengawasan pemanfaatan ruang	Kota Pengawasan pemanfaatan ruang di lapangan oleh pokja pemanfaatan ruang BKPRD Kota Dumai	3 kali	204.000.000	APBD	3 kali	100.000.000
1	4		Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman						
1	4	15	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Kualitas perumahan dan pemukiman	100%	430.000.000		100%	
1	4	15	3 Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	SKPD Jumlah dokumen Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas	1 dokumen	350.000.000	APBD	1 dokumen	350.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Perumahan dan Pemukiman Kumuh Kota Dumai						
1	4 15 4	SKPD	Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang perumahan dan permukiman kumuh ke stakeholder yang terkait	15 stakeholder	80.000.000	-	15 stakeholder	30.000.000
3									
3	3		Perencanaan						
3	3 19		Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Jumlah dokumen kebijakan perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	1 Dokumen	1.162.000.000		9 Dokumen	
3	3 19 0	SKPD	Koordinasi perencanaan penanganan perumahan	Dokumen perencanaan teknis penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta perumahan permukiman diluar kawasan kumuh	1 dokumen	50.000.000	APBD	1 dokumen	50.000.000
3	3 19 0	SKPD	Koordinasi perencanaan penanganan infrastruktur	Jumlah koordinasi perencanaan penanganan infrastruktur	9 kali	142.000.000	APBD	10 kali	107.000.000
3	3 19 2	SKPD	Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan	Tertindaknya koordinasi terkait penyelesaian dan perencanaan infrastruktur transportasi	9 kali	100.000.000	APBD	10 kali	100.000.000
3	3 19 4	SKPD	Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan Nasional-Provinsi-Kabupaten/Kota di Bidang Perekonomian	6 OPD	136.000.000	APBD	6 OPD	136.000.000
3	3 19 5	SKPD	Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri	Tersusunnya dokumen perencanaan penanganan pusat-pusat industri	1 Dokumen	200.000.000	APBD	1 Dokumen	200.000.000
3	3 19 9	SKPD	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Tercapainya dokumen perencanaan akses air bersih/air minum dan sanitasi yang di Kota Dumai	2 dokumen	350.000.000	APBD	2 dokumen	300.000.000
3	3 19 10	SKPD	Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan	Tertindaknya koordinasinya penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan	8 kali	40.000.000	APBD	8 kali	40.000.000
3	3 19 11	SKPD	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dokumen dan data-data hasil monitoring dan evaluasi perencanaan fisik sarana dan prasarana	1 dokumen	144.000.000	APBD	1 dokumen	144.000.000
3	3 17		Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Jumlah dokumen usulan program dan kegiatan rencana tata ruang perbatasan	1 Dokumen	200.000.000		1 Dokumen	
3	3 17 3	SKPD	Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan	Dokumen usulan program dan kegiatan rencana tata ruang	1 dokumen	200.000.000	APBD	1 dokumen	200.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
			perbatasan ke BPPD Provinsi Riau dan BNPP Pusat								
3	3	15	Program Pengembangan data/informasi	Persentase peningkatan data dan informasi terhadap pembangunan daerah	70%	550.000.000		4 dokumen			
3	3	15	7	Sistem Informasi Perencanaan Daerah	SKPD	Jumlah aplikasi yang terinput	2 aplikasi	350.000.000	APBD	2 aplikasi	350.000.000
						Jumlah orang admin OPD aplikasi Simreda yang terbayarkan	37 orang			37 orang	
3	3	15	9	Penyusunan Data Perencanaan Daerah	SKPD	Jumlah data yang terinput pada aplikasi informasi database pembangunan Kota Dumai	60%	200.000.000	APBD	60%	200.000.000
						Jumlah buletin pada Litbang Bappeda	1 Buletin			1 Buletin	
						Jumlah laporan SIPD	1 Laporan			1 Laporan	
3	3	16		Program Kerjasama Pembangunan		Persentase Peningkatan Kerjasama pembangunan daerah	60%	247.899.400		7 kali	
3	3	16	4	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	SKPD	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah	1 Tahun	247.899.400	APBD	1 Tahun	247.899.400
						Jumlah Laporan TJSP/CSR yang berpartisipasi dalam Pembangunan Daerah	1 Laporan			1 Laporan	
3	3	21		Program perencanaan pembangunan daerah		Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan	10 Dokumen	2.071.712.720		10 Dokumen	
3	3	21	0	Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	SKPD	Jumlah dokumen Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	1 Dokumen	165.000.000	APBD	1 Dokumen	165.000.000
3	3	21	1	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	SKPD	Terlaksananya forum OPD	1 forum	171.314.100	APBD	1 forum	171.314.100
3	3	21	8	Penyusunan rancangan RKPd	SKPD	Tersusunnya Dokumen RKPd dan Dokumen Perubahan RKPd	2 Dokumen	247.778.400	APBD	2 Dokumen	247.778.400
3	3	21	9	Penyelenggaraan musrenbang RKPd	Kota	Jumlah Musrenbang RKPd yang dilaksanakan, keikutsertaan Pra dan Pasca Musrenbang Provinsi Riau, keikutsertaan Musrenbang tingkat Nasional Tahun 2019	3 kali	288.374.400	APBD	3 kali	288.374.400
3	3	21	11	Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Kota	Jumlah Lakip yang disusun dan disampaikan ke kemendagri dan pemerintah provinsi	1 dokumen	223.977.720	APBD	1 dokumen	223.977.720

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3 3 21 12	Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Kota	Jumlah dokumen LKPJ yang disampaikan tepat waktu	1 dokumen	254.393.100	APBD		1 dokumen	254.393.100
3 3 21 13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi RKPD	5 dokumen	87.265.000	APBD		5 dokumen	87.265.000
3 3 21 15	Bimbingan Teknis Evaluasi dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimtek	1 Kali	170.000.000	APBD		1 Kali	170.000.000
3 3 21 21	Evaluasi rencana aksi daerah pemberantasan korupsi (RAD-PK) dumai	SKPD	Jumlah dokumen pelaporan RAD-PK	1 dokumen	226.610.000	APBD		1 dokumen	226.610.000
3 3 21 24	Penyusunan dan evaluasi perencanaan aksi daerah sustainable development goals	SKPD	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi SDG-s	1 dokumen	237.000.000	APBD		1 dokumen	237.000.000
3 3 22	Program perencanaan pembangunan ekonomi		Jumlah dokumen kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan ekonomi	4 Dokumen	330.000.000			4 Dokumen	
3 3 22 4	koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	SKPD	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	1 dokumen	200.000.000	APBD		1 dokumen	200.000.000
3 3 22 8	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	SKPD	Jumlah dokumen	1 dokumen	130.000.000	APBD		1 dokumen	130.000.000
3 3 23	Program perencanaan sosial dan budaya		Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan bidang sosial budaya	5 Dokumen	915.796.800			5 Dokumen	
3 3 23 3	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	SKPD	Persentase koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	90%	195.000.000	APBD		90%	195.000.000
3 3 23 4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	SKPD	Jumlah dokumen dan data-data hasil monitoring dan evaluasi perencanaan sosial budaya	1 dokumen	155.000.000	APBD		1 dokumen	155.000.000
3 3 23 5	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM	SKPD	Persentase koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM	90%	230.796.800	APBD		90%	230.796.800
3 3 23 6	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur Pemerintahan	SKPD	Persentase koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur	90%	175.000.000	APBD		90%	175.000.000
3 3 23 8	Penyusunan data dan informasi perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan SDM	SKPD	Jumlah dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan SDM	1 dokumen	160.000.000	APBD		1 dokumen	160.000.000
3 1	Administrasi Pemerintahan								
3 1 35	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah		Persentase penyediaan Informasi Pemerintah Daerah	90%	30.000.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3 1 35 3	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Kota	Persentase informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan	90%	80.000.000	APBD		90%	80.000.000
4									
4 7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
4 7 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		Jumlah dokumen penanggulangan kemiskinan	1 Dokumen	300.000.000			1 Dokumen	
4 7 15 5	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	SKPD	Jumlah dokumen	1 dokumen	300.000.000	APBD		1 dokumen	300.000.000
3									
3 2	Pengawasan								
3 2 20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		persentase peningkatan Serapan Realisasi Anggaran Kota Dumai	80%	250.000.000				
3 2 20 26	Evaluasi realisasi anggaran	SKPD	Meningkatnya Serapan Realisasi Anggaran Kota Dumai	80%	250.000.000	APBD		90%	250.000.000
3 4	Keuangan								
3 4 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase aset milik perangkat daerah yang dikelola dengan baik	90%	30.000.000				
3 4 17 110	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	SKPD	Persentase aset milik perangkat daerah yang dikelola dengan baik	90%	30.000.000	-		90%	30.000.000
0	Non Urusan								
0 1									
0 1 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase ketersediaan kebutuhan administrasi kantor	100%	2.456.193.660			100%	
0 1 1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota	Jumlah surat menyurat	12 Bulan	3.600.000	APBD		12 Bulan	3.600.000
0 1 1 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	SKPD	Teraksanya panitia pameran Kota Dumai Tahun 2019	1 kali	30.000.000	APBD		1 kali	30.000.000
0 1 1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Tersedianya Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2	24 unit	55.000.000	-		24 unit	55.000.000
0 1 1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD	Jumlah jasa kebersihan kantor	12 Bulan	125.000.000	APBD		12 Bulan	125.000.000
0 1 1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	SKPD	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	15 unit	84.350.000	-		18 unit	84.345.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0 1 1 10	Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	199.000.000	-		12 bulan	360.184.000
0 1 1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	62.747.660	-		12 bulan	62.747.660
0 1 1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik kantor	12 bulan	240.000.000	-		12 bulan	240.000.000
0 1 1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan tentang perundang-undangan	2 Jenis	50.000.000	-		2 Jenis	50.000.000
0 1 1 17	Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	Tersedianya makanan dan minuman Tamu,Rapat serta Harian	12 bulan	84.096.000	-		12 bulan	84.096.000
0 1 1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD	Terselenggaranya perjalanan dinas dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	12 Bulan	700.000.000	APBD		12 Bulan	700.000.000
0 1 1 19	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	SKPD	Jumlah penyediaan jasa keamanan kantor	6 orang	122.400.000	APBD		6 orang	122.400.000
0 1 1 20	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD	Terbayarnya pembayaran honor jasa administrasi perkantoran	12 Bulan	700.000.000	-		12 Bulan	700.000.000
0 1 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	1.820.000.000			100%	
0 1 2 3	Pembangunan gedung kantor	SKPD	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 kegiatan	200.000.000	APBD		1 kegiatan	200.000.000
0 1 2 5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	2 unit	600.000.000	APBD		2 unit	600.000.000
0 1 2 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	9 unit	200.000.000	APBD		9 unit	200.000.000
0 1 2 9	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah peralatan sarana dan prasarana untuk aparatur BAPPEDA	11 unit	200.000.000	APBD		11 unit	200.000.000
0 1 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara berkala	8 unit	220.000.000	APBD		8 unit	220.000.000
0 1 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	24 Kendaraan	400.000.000	APBD		24 Kendaraan	400.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
0	1	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	10 orang	530.000.000		95 orang	
0	1	5	1 Pendidikan dan pelatihan formal	SKPD	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal	12 orang	130.000.000	APBD	12 orang	130.000.000
0	1	5	2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan	SKPD	Tersosialisasi peraturan perundang-undangan	1 Kali	200.000.000	APBD	1 Kali	200.000.000
0	1	5	4 Pembinaan mental dan fisik aparatur	SKPD	Terlaksananya pembina jasmani dan rohani	12 Kali	200.000.000	APBD	12 Kali	200.000.000
					Jumlah Aparatur yang mengikuti pembinaan fisik dan mental di Bappeda	50 Orang			50 Orang	
0	1	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Jumlah Dokumen pelaporan kinerja dan keuangan	3 Dokumen	130.000.000		5 Dokumen	
0	1	6	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 dokumen	70.000.000	APBD	3 dokumen	70.000.000
0	1	6	4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	2 dokumen	60.000.000	APBD	2 dokumen	60.000.000
					TOTAL		12.517.602.580			12.361.781.580

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Bappeda Kota Dumai Tahun 2019, merupakan penjabaran pelaksanaan tahun ketiga dari Rencana Strategis Bappeda Kota Dumai Tahun 2016 - 2021. Dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016 - 2021 serta hasil analisis, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2018, Dokumen Renja Tahun 2019 mendukung pelaksanaan rencana kerja tahun ketiga Walikota Dumai periode tahun 2016-2021 yang merupakan tahun *Tahap Pengembangan* yakni Mengembangkan instrumen pendukung yang kondusif bagi terwujudnya Masyarakat kota Dumai makmur dan madani yang didukung oleh Masyarakat yang kompetitif, kreatif serta penguatan investasi dan pasar untuk mendukung perekonomian masyarakat.

Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsi Bappeda, Rencana Kerja Bappeda Kota Dumai tahun 2019 sebagai dokumen rencana operasional Bappeda Kota Dumai pada tahun 2019. Diharapkan dengan pelaksanaan program/kegiatan prioritas dan program/kegiatan pendukung lainnya maka kualitas perencanaan pembangunan Kota Dumai akan semakin baik dan terintegrasi di semua aspek pembangunan.

Kepala Bappeda Kota Dumai, *Ma*


MUHAMMAD SYAFIE, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19650122 199903 1 002

RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		n dan evaluasi pembangunan ekonomi					n dan evaluasi pembangunan ekonomi			
koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	SKPD	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	1 dokumen	200.000.000	koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	SKPD	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	1 dokumen	200.000.000	
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	SKPD	Jumlah dokumen	1 dokumen	130.000.000	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	SKPD	Jumlah dokumen	1 dokumen	130.000.000	
Program perencanaan sosial dan budaya		Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan bidang sosial budaya	5 Dokumen	915.796.800	Program perencanaan sosial dan budaya		Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan bidang sosial budaya	5 Dokumen	915.796.800	
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	SKPD	Persentase koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	90%	195.000.000	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	SKPD	Persentase koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	90%	195.000.000	
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	SKPD	Jumlah dokumen dan data-data hasil monitoring dan evaluasi perencanaan sosial budaya	1 dokumen	155.000.000	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	SKPD	Jumlah dokumen dan data-data hasil monitoring dan evaluasi perencanaan sosial budaya	1 dokumen	155.000.000	
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM	SKPD	Persentase koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM	90%	230.796.800	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM	SKPD	Persentase koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM	90%	230.796.800	
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur Pemerintahan	SKPD	Persentase koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur	90%	175.000.000	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur Pemerintahan	SKPD	Persentase koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur	90%	175.000.000	
Penyusunan data dan informasi perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan SDM	SKPD	Jumlah dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan SDM	1 dokumen	160.000.000	Penyusunan data dan informasi perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan SDM	SKPD	Jumlah dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan SDM	1 dokumen	160.000.000	
Administrasi Pemerintahan										
Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah				58.000.000	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah		Persentase penyediaan Informasi Pemerintah Daerah	90%	80.000.000	
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Kota	Persentase informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan	90%	58.000.000	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan Informasi Hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan	Kota	Persentase informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan	90%	80.000.000	
Pengawasan										
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				250.000.000	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		persentase peningkatan Serapan Realisasi Anggaran Kota Dumai	80%	250.000.000	
Evaluasi realisasi anggaran	SKPD	Meningkatnya Serapan Realisasi Anggaran Kota Dumai	80%	250.000.000	Evaluasi realisasi anggaran	SKPD	Meningkatnya Serapan Realisasi Anggaran Kota Dumai	80%	250.000.000	